



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CAREM
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN
3. NHH : 274887

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m²/36 m² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/90 m² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m²/30 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/29 m² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 85.500.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FINO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, YAMAHA ZR SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 33.800.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.227.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.258.527.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.258.527.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.